BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewarganegaraan Indonesia dapat hilang apabila memenuhi semua atau salah satu unsur hilangnya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a s/d huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Adapun unsur hilangnya kewarganegaraan Indonesia:
 - a. memperoleh kewarganegaraan lain
 - b. tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain
 - c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri
 - d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden
 - e. masuk dalam dinas negara asing
 - f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing
 - g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam ketatanegaraan negara asing
 - h. mempunyai paspor negara asing diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya,
 - i. bertempat tinggal diluar negeri 5 tahun secara terus menerus bukan karena dinas negara, dengan sengaja tidak menyata keinginan tetap menjadi WNI.
2. Akibat hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia adalah hilangnya hak serta tanggung jawab maupun fasilitas negara Indonesia terhadap warga negara. Adapun kerugian negara yang dilepaskan dari

kewarganegaraan ialah tidak ada, negara yang dilepaskan tidak dapat memberikan hak-hak sebagaimana Pasal 27-30 UUD 1945 dan warga negara tidak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28-30 UUD 1945 karena telah kehilangan subjeknya sebagai warga negara Indonesia. Untuk menjamin pertahanan dan keamanan negara maka perlu ada batasan dalam mengizinkan seseorang yang telah hilang kewarganegaraan Indonesia untuk kembali memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Maka unsur kehilangan yang paling tepat untuk dimungkinkan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang telah hilang adalah Pasal 23 ayat 1 huruf (a) dan huruf (i) selain dari huruf tersebut maka yang lain dirasa tidak perlu karena dirasa kurang tepat mengingat dampak yang akan membahayakan negara cukup besar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Meskipun telah dijelaskan secara tersirat didalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang akibat hukum kehilangan kewarganegaraan Indonesia, untuk menghindari multitafsir dan kekeliruan dalam penyelenggaraannya perlu ditambahkan penjelasan mengenai akibat hukum dari hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Juga perlu ada ketegasan dari Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia mengenai unsur-unsur yang

mana yang paling tepat untuk diizinkan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia.

2. Warga Negara Indonesia yang ingin melepaskan kewarganegaraan Indonesia harus mempertimbangkan keputusannya terlebih dahulu, agar tidak menyesal dikemudian hari dan menimbulkan kerugian baik untuk dirinya sendiri maupun merugikan negara Indonesia.